

Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi)

Wirmie Eka Putra

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia

*Email korepondensi: wirmie_eka@unja.ac.id

Recieved: 06-12-2017 | Revised: 30-12-2017 | Accepted: 29-01-2018

Abstract

This study aims to determine whether Functional Control, Public Accountability and Improvement of Public Service affect the performance of Jambi Provincial Government simultaneously and partially. This research was conducted in the province of Jambi sourced from all SKPD Jambi Province. Number of SKPD analyzed a total of 32 SKPD that the Department and the Agency with a total population of 598, after using Taro Yamane formula for determining the number of samples of the total population and it can be the result of 86 respondents to be studied. The type of data used are primary data. Data obtained from questionnaires research on each SKPD province of Jambi. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression and testing using SPSS. Results from this study showed that simultaneous variables Functional Monitoring, Public Accountability and improvement of public services affect the Local Government Performance variables. Functional Monitoring partially affect the local Government Performance and Accountability of Public partially affect the Performance of Local Government and Public Service partially affect the Local Government Performance.

Kata Kunci: Functional Supervision, Public Accountability, Improved Public Services, The Performance Of Local Governments.

Saran sitasi:

Putra, W. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(2), 181-187. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>

1. Pendahuluan

Salah satu ciri dari pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk

terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan. Sebagai dampak dari pemerintahan yang baik yaitu terbentuknya pelayanan publik yang baik pula.

Peningkatan pelayanan publik merupakan wujud dari Kinerja Pemerintahan. Peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintahan harus mencakup seluruh

masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan aparat pemerintahan. Akan tetapi penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat guna untuk pemenuh kebutuhan dari kinerja pemerintahan yang terkait seperti yang diketahui.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hal ini maka yang menghubungkan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah Baswir (2004) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Lebih jauh menurut Nordiawan (2008), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi,

efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Harvianda, Surya, dan Azlina (2014). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan satu variabel Peningkatan Pelayanan Publik. Variabel Dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah adalah kinerja yang merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk terhadap tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Adapun alasan dipilihnya Provinsi Jambi sebagai objek penelitian dikarenakan di Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang bisa dibilang maju di pemerintahannya dan memiliki potensi dalam kinerja pemerintahan daerahnya yang belum banyak diketahui masyarakat luas, transparansi pemerintahan dikota jambi dalam mencapai sasaran pemerintahan yang baik dari pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintahan di Provinsi Jambi. Dalam pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Provinsi Jambi cenderung “berjalan di tempat”. Dalam pelayanan publik sering menjadi variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak seimbang dalam menunjukkan kepada publik terhadap pemerintahnya. Efisiensi dan Efektivitas

pelayanan Publik belum menunjukkan bagaimana pelayanan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik berpengaruh simultan maupun parial terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer tersebut dalam bentuk persepsi atau jawaban responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berhubungan dengan pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pada penelitian ini populasi dibatasi pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari 32 SKPD. Responden dari penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV di Dinas provinsi Jambi berjumlah 598 orang. Pejabat eselon III dan IV dipilih sebagai responden dengan alasan untuk melihat kinerja Dinas yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus Taro Yamane. Dari hasil perhitungan, jumlah sampel penelitian ini sebanyak 86 responden.

Definisi Operasional Variabel Penelitian meliputi;

1) BPengawasan Fungsional (X_1) merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Dalam hal ini responden diminta menjawab tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dimana dapat mengamati, memahami, dan menilai. Masing-masing item pertanyaan tersebut

diukur dengan Skala *Likert*, instrument yang dipakai sebagaimana yang digunakan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014).

- 2) Akuntabilitas Publik (X_2) terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Dalam hal ini responden diminta menjawab tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pihak yang memegang amanah, menyajikan laporan keuangan dan dapat mengungkapkan segala aktivitas di lingkup pemerintahan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan Skala *Likert* sebagaimana yang digunakan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014).
- 3) Peningkatan Pelayanan Publik (X_3), Nurcholish (2005) memberikan pengertian publik sebagai jumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, harapan, sikap dan tindakan yang benar baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki. Dalam hal ini responden diminta menjawab tentang bagaimana melakukan evaluasi pelayanan pihak pemerintah yang baik kepada masyarakat luas. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan Skala *Likert* sebagaimana diatur dalam KepmenPAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003.
- 4) Kinerja Pemerintah Daerah (Y) berarti sekelompok orang dalam organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan atau sekumpulan orang dan individu yaitu pegawai negeri yang berada pada badan atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi atau tugas pemerintahan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan Skala *Likert* sebagaimana yang digunakan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014)

Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dua variabel independen yaitu pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik terhadap variabel terikat berupa kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis korelasi berganda. Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,360 + 0,221 X_1 + 0,157 X_2 + 0,233 X_3$$

Hasil uji F yang dilakukan untuk melihat pengaruh pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah digambarkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 46,511, sedangkan F_{tabel} sebesar 1,435, dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa hipotesis alternatif yang diajukan diterima semua variabel independen yaitu pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 2, di mana nilai t_{hitung} merupakan nilai yang didapat dengan membandingkan koefisien regresi tiap variabel dengan standar error dari koefisien regresi tersebut. Kriteria keputusan diambil dengan melihat nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} .

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah

Pada variabel pengawasan fungsional (X_1), nilai t_{hitung} sebesar 4,639 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988. $t_{hitung} > t_{tabel}$, hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah

Pada variabel akuntabilitas publik (X_2), nilai t_{hitung} sebesar 3,892, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988. $t_{hitung} > t_{tabel}$, hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah

Pada variabel pelayanan publik (X_3), nilai t_{hitung} sebesar 2,685, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,988. $t_{hitung} > t_{tabel}$, hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, pelayanan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) dalam Tabel 3.

Dari Tabel 3, terlihat bahwa besarnya koefisien determinasi (adjusted R^2) yaitu sebesar 0,616. Hal ini berarti bahwa pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama mampu menjelaskan kinerja pemerintah daerah sebesar $0,616 \times 100\% = 61,6\%$, sedangkan sisanya sebesar 38,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Setiap variabel ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (Pengawasan fungsional, Akuntabilitas publik dan Pelayanan publik) terhadap variabel dependen (Kinerja Pemerintah Daerah) sebesar 61,6% yang digolongkan besar pengaruhnya. Sedangkan 38,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	363,623	3	121,208	46,511	,000 ^a
Residual	213,691	82	2,606		
Total	577,314	85			

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Koefisien	Std. Error	t hitung	Sig.
(Constant)	3,360	2,488	1,351	,181
Pengawasan	,221	,048	4,639	,000
Akuntabilitas	,157	,040	3,892	,000
Pelayanan	,233	,087	2,685	,009

Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square
Model	0,794 ^a	0,630	0,616

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Dilihat dari nilai koefisien regresi, koefisien regresi pengaruh pengawasan fungsional sebesar 0,221, yang berarti bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel independent setiap yaitu pengawasan fungsional maka akan mengalami kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,221. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014), Laksana dan Handayani (2014), Wulandari (2013) yang menyebutkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini dari teori dan beberapa penelitian terdahulu, menurut penulis dikarenakan adanya variabel lain yang lebih mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selain pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan pelayanan publik, dan lain-lain.

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi atau peranan dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional,

baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Hasil analisis data pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah memperlihatkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014), Laksana dan Handayani (2014), Sudiarta, dkk (2014), Marsiwi dan Hartanto (2014) yang menyebutkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini dari teori dan beberapa penelitian terdahulu, menurut penulis dikarenakan adanya variabel lain yang lebih mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selain pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan pelayanan publik, dan lain-lain.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Nordiawan (2008), pelaporan kinerja sangat penting karena

kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

Hasil analisis data pengaruh peningkatan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah memperlihatkan bahwa peningkatan pelayanan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harvianda, Surya, dan Azlina (2014), Sadjiarto (2014), Putra (2014), Wulandari (2013), Mustafa dan Halim (2008) yang menyebutkan bahwa Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian ini dari teori dan beberapa penelitian terdahulu, menurut penulis dikarenakan adanya variabel lain yang lebih mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selain pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan pelayanan publik, dan lain-lain.

Peningkatan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara secara global. Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang

bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu (1) Pengawasan fungsional, akuntabilitas publik dan peningkatan pelayanan publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. (2) Pengawasan fungsional, Akuntabilitas publik, dan Peningkatan pelayanan publik secara parsial berpengaruh Terhadap kinerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. (3) Pengaruh Penyawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi adalah sebesar 61,6% dan termasuk dalam kategori yang besar.

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam peneilitian ini adalah sebagai berikut yaitu : (1) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, dan Pelayanan Publik, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. (2) Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioer yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah mendukung selesainya penelitian ini

6. Daftar Pustaka

- Arja Sadjiarto. (2014). *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Univ. Kristen Petra.*
- Baswir, Revrison. (2005). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia.* Jogjakarta : BPF.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi kedua., Jakarta: Salemba Empat
- Laksana, Agung Puja & Bestari Dwi Handayani. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, & Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kab. Batang.* Jur. Akuntansi, FE Univ. Negeri Semarang, Indonesia.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPF.
- Marsiwi, Dwiati & Hartanto, Arif. (2014). *Pengukuran kinerja & pertumbuhan ekonomi kabupaten ponorogo sebagai wujud akuntabilitas publik.* *Jurnal Ekulibrum,* FE Jurusan Akuntansi. Volume 12, Nomor 1, Maret 2014.
- Mustafa, Bob dan Halim, Abdul. (2008). *Pengukuran Kinerja Dispenda Prov. Kalimantan Barat.* FEB UGM Yogyakarta & Univ. Negeri Pontianak.
- Nordiawan, Deddi. (2008). *Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Grasindo: Jakarta..
- Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 2005 *Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- Putra, Hendra G. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (studi empiris pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pasaman barat).* FE Jurusan Akuntansi Univ. Negri Padang.
- Sudiarta, Dewa Gede, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Edy Sujana. (2014). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat & Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderating.* *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Jurusan Akuntansi Program S1. Volume: 2 No. 1 Tahun 2014.
- Wulandari, Indah. (2013). *Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemkot Padang.* FE Jurusan Akuntansi Univ. Negri Padang, Indonesia.
- Yulia Petra Harvianda, R. Adri Satriawan Surya, dan Nur Azlina. (2014). *Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* *Jurnal JOMFEKON,* Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. ISSN: 2303-1174 Vol.1 Nomor. 2 Oktober 2014.